

FRANZ MAGNIS-SUSENO, TRAGEDI '65, DAN REKONSILIASI POLITIK

Baskara T. Wardaya

Berakhirnya Perang Dingin pada awal dekade 1990-an membawa dampak global yang sangat luas. Peristiwa bersejarah yang bagi sebagian besar orang datangnya nyaris tak terduga itu membuat banyak relasi internasional maupun nasional menuntut untuk dikaji ulang atau dinegosiasikan kembali. Sebagaimana kita ketahui, negara-negara Eropa Timur yang waktu itu terkesan tunduk sepenuhnya di bawah kuatnya himpitan sayap dominasi Uni Soviet satu per satu bergolak menuntut kemerdekaan. Yugoslavia yang selama Perang Dingin bersatu di bawah kontrol Serbia, pada tahun 1990-an dilanda banjir darah ketika negara-negara anggotanya berkehendak untuk memisahkan diri. Jerman—negeri tempat kelahiran Franz Magnis-Suseno—yang sejak Perang Dunia Kedua dipecah menjadi dua negara seturut kepentingan ideologi Blok Barat dan Blok Timur, bergerak untuk bersatu kembali.

Secara internal berakhirnya Perang Dingin juga membuat banyak negara mengalami pergolakan yang akhirnya berujung pada terjungkirnya sejumlah pemerintahan diktatorial. Tumbangnya pemerintahan otoriter Nicolae Ceaucescu di Romania adalah salah satu contoh. Pada pekan-pekan pertama berakhirnya Perang Dingin Romania sudah mulai bergolak, dan pada akhir tahun 1989 Ceaucescu diadili untuk kemudian dieksekusi mati. Selain itu kita masih ingat, di Uni Soviet sendiri embusan angin pembaruan yang bermula dari program *perestroika* (restrukturisasi) dan *glasnost* (keterbukaan) di penghujung Perang Dingin akhirnya membuat “uni” itu kehilangan legitimasinya dan menjadikan kesatuan artifisial Republik Uni Soviet Sosialis hancur berantakan.

1. Keadilan Transisional

Seiring dengan terjadinya berbagai pergolakan di tingkat internasional maupun domestik menyusul berakhirnya Perang Dingin itu banyak negara melakukan pembaharuan diri dengan cara menyelidiki dan mengolah pengalaman kolektif masa lalu terkait pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM). Jerman, misalnya. Dengan gagah berani negara tersebut mengakui terjadinya kejahatan massal selama berkuasanya pemerintah komunis di Jerman Timur. Tak lama setelah bergabungnya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur, yakni pada tahun 1992, pemerintah Jerman Bersatu membentuk *Enquete Commission* atau Komisi Pencarian dengan mandat memaparkan praktik dan cakupan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah komunis Jerman Timur dari tahun 1950 hingga 1959. Komisi yang terdiri dari enam orang komisioner itu menyampaikan laporannya pada tahun 1994 dengan judul *Inquiry Commission in the Bundestag for the “Treatment of the Past and the Consequences of the SED-Dictatorship in Germany”*.¹

Afrika Selatan selain berhasil menumbangkan sistem apartheid, juga berhasil mendorong dan menyelenggarakan rekonsiliasi nasional. Pada tahun 1995 negeri di ujung selatan benua Afrika itu membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Cukup berat

1 Mark R. Amstutz. *The Healing of Nations: The Promise and Limits of Political Forgiveness*. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2005, h. 26.

perjuangan komisi tersebut, namun akhirnya berhasil membantu masyarakat mengolah masa lalu yang diskriminatif tanpa kekerasan, berikut membentuk tatanan hidup baru yang lebih memungkinkan sikap hormat satu sama lain. Setidaknya ada tiga keyakinan utama yang mendasari keberhasilan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. *Satu*, keyakinan bahwa penyembuhan luka kolektif masa lalu hanya bisa dilakukan jika masa lalu itu diketahui dan diakui (*known and acknowledged*). *Dua*, keyakinan bahwa tindakan pengadilan dan penghukuman atas rezim pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidak hanya akan sulit, melainkan juga bisa kontraproduktif terhadap proses demokrasi. *Tiga*, keyakinan bahwa pengungkapan kebenaran (*truth telling*) akan mendorong terwujudnya damai dan rekonsiliasi.²

Pada tahun-tahun selanjutnya—dalam konteks serta cakupan yang berbeda—berbagai langkah rekonsiliatif, khususnya tindakan permintaan maaf atas pelanggaran HAM masa lalu, diikuti oleh lebih banyak negara lain. Selain El Salvador dan Guatemala, juga Haiti, Honduras dan Peru.³ Belakangan langkah yang mirip juga ditempuh oleh Australia. Pada tahun 2008 pemerintah Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Kevin Rudd secara resmi menyampaikan permintaan maaf terhadap penduduk Aborigin Australia atas kasus *the stolen generation*. Kasus ini melibatkan pengambilan paksa anak-anak dari suku Aborigin guna dididik menurut tradisi dan sudut pandang penduduk kulit putih, tanpa persetujuan dari keluarga-keluarga mereka.

Dikatakan oleh Priscilla Hayner (1995) tindakan-tindakan rekonsiliatif seperti itu, khususnya pembentukan komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi, sangat dibutuhkan, terutama demi terbentuknya tekad bersama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat serupa di masa depan.⁴ Andrew Schaap (2005) menambahkan bahwa fenomena internasional seperti ini dalam perkembangan selanjutnya ikut mendorong lahirnya studi-studi di tingkat universitas yang membahas masalah-masalah di seputar pelanggaran HAM masa lalu, kebenaran dan

2 Amstuz 2005, hlm 188.

3 Amstuz 2005, hlm 26-27.

4 Priscilla B. Hayner (1995/2002). *Mencari Akar dan Pandangan Bersama*. Jakarta: Elsam, hlm 22.

rekonsiliasi. Dalam studi-studi seperti itu dipelajari tema-tema seputar masalah keadilan kolektif di negara-negara yang sedang mengalami transisi dari sistem pemerintahan yang otoriter (dan biasanya diwarnai banyak kekerasan) ke sistem pemerintahan yang demokratis. Lahirlah misalnya kajian mengenai keadilan transitional atau *transitional justice*.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Schaap, menurut Barkan (2006) dekade 1990-an banyak ditandai oleh fenomena meminta maaf secara kolektif. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai fenomena "*group apology*". *Group apology* ini, menurut Barkan, adalah tindakan meminta maaf secara kolektif, yang dilakukan oleh sekelompok orang—entah sebagai kelompok masyarakat, entah sebagai bangsa—yang merupakan mantan pelaku kekerasan kolektif di masa lalu terhadap para mantan korbannya. Barkan mengamati bahwa *group apology* itu telah menjadi suatu kebutuhan umum di tingkat internasional.⁵ Hal itu menurutnya antara lain tampak dalam banyaknya negara yang pemerintahannya melakukan tindakan meminta maaf. Beberapa contohnya telah kita lihat di atas.

2. Semakin Manusiawi

Bersamaan dengan semakin populernya gagasan *group apology* itu, tampaknya makin populer pula wacana tentang rekonsiliasi, mengingat begitu eratnya kaitan timbal-balik antara rekonsiliasi dan permintaan/pemberian maaf. Dalam wacana tersebut maaf atau *forgiveness* dipandang sebagai salah satu unsur terpenting yang harus dilalui sebelum suatu rekonsiliasi terwujud. Namun demikian, rekonsiliasi yang dimaksud dalam wacana ini bukanlah terutama rekonsiliasi yang sifatnya personal atau interpersonal, melainkan rekonsiliasi yang bersifat kolektif, sebagaimana yang dicatat oleh Barkan.

Berkaitan dengan wacana rekonsiliasi ini salah satu pendekatan yang sekarang banyak dibahas adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Hannah Arendt, yakni pendekatan politis, atau yang biasa disebut sebagai rekonsiliasi politik

5 Elazar Barkan and Alexander Karn, Eds. (2006). *Taking Wrong Seriously: Apologies and Reconciliation*. Stanford: Stanford University Press.

(*political reconciliation*).⁶ Tanpa berpretensi untuk memaparkan keseluruhan gagasan Arendt tentang rekonsiliasi politik, di sini ingin coba digarisbawahi beberapa contoh saja dari gagasan Arendt tentang tema tersebut. Diharapkan suatu saat gagasan-gagasan itu bisa dieksplorasi lebih lanjut. Dalam konteks tulisan ini penggarisbawahan itu penting mengingat bahwa tampaknya ada banyak singgungan antara gagasan-gagasan Arendt dan gagasan-gagasan Franz Magnis-Suseno tentang topik yang sama. Untuk itu sebelum bicara lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran Magnis-Suseno terkait tema rekonsiliasi, khususnya berkaitan dengan tragedi 1965, ada baiknya jika kita simak sejenak beberapa pemikiran Arendt tentang tema tersebut.

Ketika bicara tentang rekonsiliasi, Arendt beritik tolak pada pengalaman sejarah Jerman. Secara khusus ia bertolak dari pengalaman pahit atas terjadinya pembantaian massal yang dilakukan oleh partai sosialis nasional (NAZI) di bawah Adolf Hitler terhadap orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita tahu, jumlah korban dari peristiwa tersebut mencapai jutaan orang. Arendt pertama-tama melihat bahwa tidak terselesaikannya masalah pembantaian itu membuat adanya semacam jurang pemisah (*abyss*) yang menganga antara para korban dan keturunannya pada satu sisi, dan para pelaku beserta keturunannya pada sisi lain.⁷ Selanjutnya, adanya jurang itu membuat kedua belah pihak tak mampu (mungkin juga tak mau) berbicara satu sama lain. Meskipun hidup berdampingan, selalu saja terasa ada sesuatu yang memisahkan kedua kelompok.

Terhadap situasi yang demikian Arendt mengedepankan sebuah gagasan dalam rangka mencari solusi, yakni mendorong diupayakannya rekonsiliasi. Bagi Arendt, rekonsiliasi ini penting, karena melalui mekanisme rekonsiliasi diharapkan akan semakin tertutuplah “jurang” yang menganga itu. Lebih lanjut diharapkan bahwa dua kelompok yang berdiri di kedua sisinya itu akan bisa saling berkomunikasi dan hidup berdampingan kembali

6 Dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahan yang secara leksikal lebih tepat adalah “rekonsiliasi politis”. Namun demikian, mengingat bahwa istilah “politis” sering memiliki kandungan konotasi pejoratif, di sini dipakai istilah “rekonsiliasi politik”.

7 Hannah Arendt, (1994) *Essays in Understanding 1930-1954*, J. Kohn (ed.). New York: Harcourt Brace & Co., hlm 212-216.

sebagaimana mestinya. Perlu dicatat, dalam membicarakan masalah rekonsiliasi ini Arendt dengan sengaja tidak berfokus pada rekonsiliasi yang lingkungannya personal atau interpersonal, melainkan komunal. Hal itu ia tempuh mengingat bahwa dalam sebuah rekonsiliasi dengan cakupan komunal atau nasional ada begitu banyak jumlah orang yang terlibat di dalamnya, sehingga hampir tidak mungkin untuk bisa secara personal bertemu satu per satu. Alasan lainnya adalah karena biasanya dalam kekerasan kolektif antara para bekas pelaku dan bekas korban tidak mengenal satu sama lain secara pribadi. Ia lantas menekankan pentingnya rekonsiliasi politik.

Bagi Arendt, pada prinsipnya rekonsiliasi politik adalah suatu upaya rekonsiliasi yang mempertimbangkan faktor-faktor politik, termasuk perbedaan-perbedaan yang ada, guna menemukan fondasi bagi suatu kehidupan bersama yang mungkin saja ditemukan justru dalam kebhinekaan (*the basis from which commonness might be revealed in diversity*).⁸ Di matanya rekonsiliasi politik ini penting karena tidak pernah ada jaminan bahwa setelah berlangsungnya rekonsiliasi setiap orang akan memiliki relasi personal yang ideal, apalagi sempurna. Sebagaimana bisa dibayangkan dari pengalaman nyata, bahkan setelah sebuah rekonsiliasi itu terjadi, tetap saja akan ada hubungan-hubungan sosial-politik yang saling bertentangan berdasarkan posisi dan perspektif masing-masing. Pola relasi inilah yang oleh Carl Schmit (1996) disebut sebagai pola "*friend-enemy relation*".⁹ Artinya, bahkan setelah terjadinya rekonsiliasi, persahabatan di antara para warga komunitas yang telah ber-rekonsiliasi itu nantinya tetap saja akan diwarnai oleh perbedaan pandangan yang hendaknya tetap diakui dan diterima sebagai bagian dari realitas kehidupan bersama. Dengan demikian persahabatan yang kelak lahir setelah adanya rekonsiliasi, menurut Arendt, bukan persahabatan sentimental penuh basa-basi, melainkan persahabatan dalam konteks sosial-politik alias *civic friendship*. Dalam *civic friendship* ini Arendt membayangkan bahwa kedua belah pihak tidak akan hanya berkatat pada duka-derita

8 Andrew Schaap (2009). *Political Reconciliation*. London: Routledge, hlm 73.

9 Carl Schmit (1996). *The Concept of the Political*. Chicago: University of Chicago Press.

masa lalu, melainkan lebih pada kegembiraan dan dinamika hidup yang ada sekarang ini dan di masa depan.

Berbeda dengan rekonsiliasi yang sifatnya interpersonal, dalam rekonsiliasi politik ini menurut Arendt perlu ditekankan pentingnya kesediaan untuk menerima dunia dengan sikap positif. Misalnya memandang dunia ini sebagai tempat untuk hidup secara penuh sebagai manusia daripada sekedar tempat untuk berada saja.¹⁰ Untuk itu kita perlu melibatkan berbagai aspek yang ada di dalamnya, termasuk aspek-aspek politik. Dalam istilah Schaap (2005: 55) dalam rekonsiliasi perlu dimasukkan aspek *worldliness*, aspek dunia sebagaimana adanya. Aspek *worldliness* atau ke-dunia-an ini sangat dibutuhkan dalam setiap upaya rekonsiliasi, karena hal itu menyangkut kesadaran (bahkan kerelaan) akan realitas dunia yang tidak sempurna dan penuh dengan berbagai bentuk dinamika kehidupan bersama. Aspek *worldliness* juga penting, menurut Arendt, karena dengan memasukkan aspek itu berarti pihak-pihak yang sedang berbeda pandangan dan posisi itu membuka kemungkinan bagi masuknya intervensi politik dalam proses rekonsiliasi.

Dalam hal ini rekonsiliasi politik makin tampak berbeda dengan rekonsiliasi interpersonal. Biasanya rekonsiliasi personal bertitik tolak dari gagasan bahwa ada dua pihak yang berbeda posisi atau pandangannya, dan sekarang sedang berusaha untuk membentuk semacam ke-kita-an yang satu. Rekonsiliasi politik ingin menempuh jalan yang agak berlainan. Dalam rekonsiliasi politik ke-kita-an yang penuh dengan perbedaan posisi dan pandangan justru diakui dan diterima sebagai sebuah realitas milik bersama. Perbedaan itu bahkan dijadikan titik tolak untuk secara bersama-sama pula berusaha membentuk sebuah ke-kita-an yang baru, yang kini belum ada wujudnya. Dalam istilah Arendt, realitas tidak ideal yang ada sekarang ini justru dijadikan sarana untuk membantu terwujudnya komunitas baru yang sedang diperjuangkan melalui rekonsiliasi politik itu, yang sifatnya masih "*not yet*". Komunitas yang masih *not yet* itu kini memang masih belum ada wujudnya, tetapi justru

10 Hannah Arendt (1998). *The Human Condition*, 2nd edn. Chicago: University of Chicago Press, hlm 196-97.

karena itu sekarang ini kita perlu bersama-sama mengusahakannya supaya segera bisa terwujud.

Lebih lanjut, satu unsur sangat penting yang harus ada dalam rekonsiliasi politik itu, menurut Arendt, adalah unsur permintaan/pemberian maaf atau *forgiveness*. Menurut Arendt para mantan pelaku (berikut para keturunan dan pendukungnya) harus berani meminta maaf, atau setidaknya memiliki kehendak untuk nantinya meminta maaf, terutama jika pihaknya terbukti bersalah. Pada sisi lain, pihak yang dulu menjadi korban itu kini harus siap untuk memberikan maaf tersebut. Dasar politis bagi permintaan dan pemberian maaf ini, menurut Arendt, ada dua. Yang pertama adalah perlunya para mantan korban mengakui fakta akan ringkihnya dunia ini (*the frailty of the world*). Yang kedua adalah perlunya para mantan pelaku untuk menjadikan pemberian maaf itu sebagai titik tolak bagi proses kelahiran kembali (*natality*). Para mantan korban atau *survivor* perlu menyadari bahwa dunia ini memang penuh kelemahan, sehingga hal-hal buruk di luar perikemanusiaan bisa terjadi—apa yang mereka alami adalah salah satu contohnya—dan oleh karena itu perlu berusaha memberikan maaf kepada para mantan pelaku. Sementara itu, bagi para mantan pelaku pemberian maaf itu hendaknya dijadikan titik tolak untuk bersedia “lahir kembali” sebagai manusia-manusia baru yang akan lebih bersikap hormat terhadap setiap manusia beserta hak-hak asasinya.

Satu hal lain yang juga sangat ditekankan oleh Arendt dalam kaitan dengan rekonsiliasi politik ini adalah bahwa kedua belah pihak yang berkonflik di masa lalu itu perlu bersedia untuk *berbicara* satu sama lain. Kedua belah pihak perlu bersedia untuk duduk bersama seraya berkisah tentang pemahaman dan sudut pandangan masing-masing atas peristiwa kekerasan yang berlangsung di masa silam itu. Tindakan berbicara dan berkisah satu sama lain ini di mata Arendt merupakan bagian penting dari setiap proses rekonsiliasi, serta dari setiap upaya kita sebagai manusia untuk memaknai apa yang berlangsung di sekitar kita. Pada saat yang sama, menurutnya, dengan begitu kita akan mendapat kesempatan untuk belajar bagaimana bisa menjadi manusia-manusia yang

semakin manusiawi. Dalam kata-kata Arendt: *"We humanize what is going on in the world and in ourselves only by speaking of it, and in the course of speaking of it we learn to be human."*¹¹

2. Dirampas Kebebasannya

Sejalan dengan Hannah Arendt, Magnis-Suseno sangat menekankan pentingnya rekonsiliasi, khususnya rekonsiliasi politik. Seperti Arendt pula, ketika bicara mengenai sejarah kelam pembantaian massal di Indonesia serta mendorong diusahakannya rekonsiliasi, Magnis-Suseno juga diilhami (jika tak mau dikatakan dibayangi) oleh pengalaman negeri Jerman, yang *nota bene* adalah negeri tempat kelahirannya. Berkaitan dengan pengalaman Jerman, Magnis paham betul betapa sistem komunis itu dalam praktiknya begitu otoritarian dan represif sebagaimana yang ia saksikan di Jerman Timur dan Uni Soviet. Di Jerman Magnis-Suseno secara langsung maupun tak langsung menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh Nazi terhadap orang-orang Yahudi serta kelompok-kelompok lain yang tak dikehendaki. Selain itu ia juga menyaksikan dan merasakan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah komunis Jerman Timur terhadap rakyatnya sendiri. Ia tahu pula bagaimana Uni Soviet sebagai *dedengkot* sistem komunis dunia gencar mencaplok negara-negara sekitarnya untuk dijadikan boneka-boneka satelitnya yang patuh. Ia paham bagaimana di negeri Beruang Merah itu gagasan-gagasan Marx Muda yang penuh dengan filsafat dan spirit humanis telah direduksi dan dibajak menjadi sarana legitimasi bagi sistem partai tunggal yang sentralistik dan gemar menghabisi lawan-lawan politiknya.

Magnis-Suseno juga mengerti bagaimana di banyak negara komunis kebebasan warga masyarakat sangat dibatasi, bahkan nyaris dirampas sepenuhnya. Dari Kuba hingga Vietnam, dari RRT hingga Korea Utara hanya sedikit saja ruang yang diberikan oleh negara (baca: partai tunggal komunis) kepada rakyatnya untuk mengemukakan pendapat, atau untuk memiliki hak-hak pribadi, apalagi untuk memeluk agama. Di negeri-negeri komunis itu, Magnis tahu, setiap inisiatif untuk memperjuangkan kebebasan

11 Hannah Arendt (1968). *Men in Dark Times*. New York: Harcourt Brace & Co., hlm 25; Schaap, h. 1.

selalu dijawab dengan sanksi sosial dan politis yang tak jarang berujung pada eksekusi mati.

Tak mengherankan jika sesampainya di Indonesia pada bulan Januari 1961, Magnis-Suseno merasa gundah. Betapa tidak. Setiap hari ia menyaksikan bagaimana Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan cepat makin naik pamor dan posisinya dalam percaturan politik nasional. Ia saksikan bagaimana keanggotaan partai komunis terus membesar, sebagaimana tampak dalam rapat-rapat publik yang biasanya berlangsung dengan gegap-gempita. Selain itu sikap dan tindakan politis PKI dan para anggotanya juga tampak semakin berani. Tak urung Magnis-Suseno pun merasa cemas. "Saya mendapat kesan bahwa PKI maju di semua front...", tuturnya.¹² Ia semakin khawatir bahwa sistem komunis dengan segala catatan buruk yang ia miliki dari pengalamannya di Jerman akan segera menjadi kenyataan di Indonesia. "Saya semakin cemas dengan ancaman komunis," katanya, seraya menambahkan: "Bagi saya komunisme, sesudah nasional-sosialisme (Nazi) Jerman runtuh, merupakan ancaman paling besar terhadap umat manusia..."¹³ Apalagi setelah ia lihat bahwa PKI sering menggunakan pendekatan "konfrontatif" dalam berpolitik sehingga tak jarang menimbulkan gesekan-gesekan sosial-politik di sana-sini.¹⁴

Sementara itu, Presiden Soekarno yang sebagai pemimpin tertinggi diharapkan bersikap netral, menurut Magnis-Suseno, lama-kelamaan justru tampak makin mendekat kepada partai berlambang palu-dan-sabit itu. Selain makin berpihak pada partai politik tersebut, Soekarno juga suka memberi cap kepada mereka yang anti-PKI sebagai orang-orang yang menderita "komunisto phobi". Jelas-jelas Soekarno tidak netral. Di mata Magnis-Suseno posisi yang diambil oleh Sang Presiden itu tidak mendinginkan suasana, melainkan justru sebaliknya. Sebagai akibatnya, kata Magnis-Suseno, "suasana yang sampai pertengahan tahun 1965 diciptakan terutama oleh PKI menjadi sedemikian konfrontatif sehingga tidak mungkin ditampung lagi dalam mekanisme

12 Franz Magnis-Suseno SJ, "Indonesia 1965-66 dalam Pengalaman Saya" dalam Bernd Schaefer and Baskara T. Wardaya (2013). *1965: Indonesia and the World / Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Gramedia, hlm 393.

13 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 393.

14 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 395.

pemecahan ketegangan yang tersedia dalam budaya Indonesia tradisional.”¹⁵ Jika situasi demikian terus berlanjut, hitung Magnis-Suseno, tidak kecil kemungkinan bahwa PKI dengan ideologi komunisnya akan menjadi berjaya di Indonesia. Artinya, apa yang dulu ia saksikan terjadi di negara-negara komunis di Eropa Timur akan terjadi pula di Indonesia. Sulit dihindari, tahun-tahun pertama keberadaan Magnis-Suseno di Indonesia sangat diwarnai oleh kekhawatiran itu.

Itulah sebabnya Magnis-Suseno merasa *lega* bahwa menyusul berlangsungnya peristiwa berdarah penculikan dan pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat di Jakarta, Jenderal Soeharto mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI. “Waktu malam hari [1 Oktober 1965] suara seorang Jenderal Soeharto mengumandangkan lewat RRI bahwa gerakan itu [Gerakan Tigapuluh September] sudah dihancurkan, kami menyambutnya dengan agak lega,” tulisnya.¹⁶ Bagi Magnis-Suseno keberhasilan dalam menggagalkan Gerakan Tigapuluh September (yang waktu itu dicitrakan sebagai gerakannya PKI) merupakan titik harapan bahwa komunisme tidak jadi menjelma menjadi kekuatan dominan di Indonesia. “Saya memang mengharapkan agar kaum komunis tidak diberi kesempatan lagi menjadi kekuatan politik”, lanjut Magnis-Suseno. Hal itu ia katakan di tengah kekhawatiran bahwa Bung Karno akan menghidupkan kembali PKI sebagai sebuah partai politik.¹⁷

Selain merasa lega karena digagalkannya Gerakan Tigapuluh September, Magnis-Suseno juga merasa plong oleh ditandatangani Surat Perintah Presiden Soekarno tanggal 11 Maret 1966 atau Supersemar. Baginya penandatanganan Supersemar merupakan sebuah pertanda baik bagi akan berakhirnya ketidakpastian situasi politik Indonesia, terutama terkait pertanyaan akan dilarang atau tidaknya PKI. Sangat melegakan, kata Magnis-Suseno, bahwa “tahap ketidakpastian itu berakhir pada tanggal 11 Maret 1966, di mana Soekarno ditekan untuk menandatangani surat termasyhur yang memerintahkan Jenderal Soeharto untuk “mengambil semua tindakan yang perlu

15 *Kompas*, 29 September 2015.

16 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 394.

17 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 395.

untuk mengembalikan keamanan' di Indonesia."¹⁸ Magnis-Suseno menyambut Supersemar itu "dengan gembira". Ia gembira bahwa surat itu akan "menjadi legitimasi bagi pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto".¹⁹ Dengan apa adanya ia mengatakan: "Betapa larangan PKI oleh Jenderal Soeharto pada 12 Maret 1966 kami rasakan seperti ada[nya] beban berat [yang] diambil dari hati kami..."²⁰ Intinya, waktu itu naiknya Soeharto menjadi penguasa baru di republik ini ia pandang sebagai suatu "perkembangan positif".²¹

Apa boleh buat, pandangan Magnis-Suseno yang begitu positif dan penuh harapan atas Soeharto dan pemerintahan barunya tidak bertahan lama. Seiring dengan semakin tersedianya informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada paruh kedua tahun 1965 dan setelahnya, pandangan Magnis-Suseno mulai berubah. Rangkaian kekerasan kolektif dan pembantaian massal, khususnya yang terjadi di Jawa dan Bali, membuatnya gelisah dan dalam hati merasa miris. Ia melihat pembantaian atas ratusan ribu orang Indonesia yang terjadi waktu itu sebagai "pembantaian tanpa pandang bulu" yang menurutnya "terasa mengerikan".²² Ia melihat bahwa "*something*" telah "*went terribly wrong*" dalam sejarah Indonesia pasca-proklamasi. Ia pun bertanya: "Apakah itu... [adalah] cara sebuah perang hidup-mati dijalankan di Indonesia?"²³ Tak pelak lagi ia menyebut apa yang diketahuinya tentang tindak kekerasan massal itu sebagai "pengalaman sejarah paling emosional dalam hidup saya."²⁴

Bersamaan dengan naiknya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto itu Magnis-Suseno, menurut pengakuannya, mulai "kehilangan harapan bahwa demokrasi dan hak-hak asasi manusia akan diberi kesempatan."²⁵ Pada tahun-tahun 1970-an ia

18 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 396.

19 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 396.

20 *Kompas*, 29 Sept 2015.

21 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 396. Setidaknya Magnis menolak untuk halnya melihat Soeharto secara hitam putih. Lihat misalnya: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/26/the-1965-tragedy-confront-or-forget-past.html> diakses 6 Mei 2016

22 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 395.

23 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 395.

24 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 392-393.

25 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 396-397.

pun mulai “mengambil sikap batin menjauhi Orde Baru Soeharto”.²⁶ Ia merasa gelisah bahwa sistem pemerintahan otoriter dan sentralistik yang dulu ia saksikan sebagai ciri dari pemerintahan komunis di Jerman Timur dan Uni Soviet beserta satelit-satelitnya kini mulai dipraktikkan juga oleh pemerintahan Orde Baru.

Dalam perjalanan selanjutnya Magnis-Suseno tidak hanya menyesalkan begitu brutalnya pembantaian massal yang mengawali berdirinya rezim Orde Baru.²⁷ Ia juga mengecam tindakan Orde Baru yang “menanamkan dalam kesadaran bawah rakyat Indonesia sebuah trauma terhadap apa pun yang ‘komunis’ atau ‘PKI’.” Ia juga mengecam bahwa tindakan seperti itu menurutnya masih berlangsung bahkan setelah pemerintahan Orde Baru itu sendiri tumbang pada tahun 1998.²⁸ Magnis sangat menyesalkan bahwa melalui apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya itu “secara sistematis dan birokratis jutaan saudara dan saudara sebangsa dibuang dari kesatuan solidaritas bangsa, dihancurkan nama baiknya, dirusak keluarga dan perekonomiannya.” Bahkan menurutnya, “banyak yang disiksa, ... diperkosa, difitnah, dirampas kebebasannya.”²⁹

3. Nama Baik

Bertolak dari pengamatan, pengalaman dan refleksi di atas, Magnis-Suseno dalam kegeramannya mendesak supaya bangsa Indonesia mulai memberanikan diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Setelah itu, anjurnya, perlu segera dicari solusi bersama. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Arendt, Magnis-Suseno menganjurkan bahwa solusi yang sekarang ini perlu diusahakan adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu menurut Magnis-Suseno, sebagaimana yang juga diusulkan oleh Arendt, bukan hanya rekonsiliasi yang bersifat interpersonal, melainkan rekonsiliasi politik. “Tuntutan itu bersifat politis,” tegas Magnis-Suseno.³⁰

26 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 397.

27 Menurutny, waktu itu “gross human rights violations had happened, just like other genocides that have occurred in the world.” Twenty million people have been stigmatized as communists.” <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/26/the-1965-tragedy-confront-or-forget-past.html>, diakses 6 Mei 2016.

28 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 398.

29 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 398.

30 *Kompas*, 29 September 2015.

Sebagai bagian langkah awal dari proses rekonsiliasi itu, usul Magnis-Suseno, “kita perlu bertanya bagaimana pelanggaran HAM begitu kasar dan luas bisa sampai terjadi.” Kita perlu diam sejenak dan mengajukan pertanyaan kepada diri-sendiri: “Kok, bangsa yang membanggakan Pancasila dan cita-cita kemerdekaan seperti termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945—yang pada setiap kesempatan diobral Orde Baru—bisa melakukan sesuatu yang termasuk genosid paling tak berperikemanusiaan di bumi ...?”³¹ Mengapa pertanyaan seperti itu harus diajukan? “Tak lain demi integritas dan harga diri kita sendiri. Bangsa Indonesia tidak dapat untuk selamanya lari dari sejarahnya,” jawab Magnis-Suseno.³²

Lebih lanjut di mata Magnis-Suseno tuntutan politis itu nantinya perlu disertai dengan upaya mempertimbangkan “tuntutan kemanusiaan dan etika”. Artinya, menurut dia, “para korban pelanggaran berat HAM akhirnya [bisa] mendapat keadilan.”³³ Ada setidaknya duapuluh juta orang Indonesia yang menurutnya telah menjadi korban pelanggaran tersebut.³⁴ Untuk itu, kata Magnis, diperlukan adanya “kebesaran hati”, khususnya kebesaran hati untuk berani mengakui bahwa “reaksi pasca G30S sama sekali keluar rel.”³⁵ Selanjutnya, ia mendesak supaya para korban kekejaman masa lalu itu dibebaskan dari stigma sebagai pengkhianat bangsa. Perlu pula mereka diakui kembali hak-hak mereka sebagai warga negara sebagaimana warga negara lain pada umumnya.³⁶ “Kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka perlu diakui kembali sepenuhnya,” tandas Magnis-Suseno.³⁷

Sebagaimana yang disampaikan oleh Arendt pula, dalam rekonsiliasi politik itu menurut Magnis-Suseno sangat diperlukan adanya kesediaan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan

31 *Kompas*, 29 September 2015.

32 <http://kupang.tribunnews.com/2015/09/20/seminar-50-tahun-g30s-romo-magnis-berani-menghadap-apa-yang-terjadi>. Diakses 6 Mei 2016.

33 *Kompas*, 29 September 2015.

34 Kata Magnis, “Twenty million people have been stigmatized as communists. Those who belong to the communists are seen as malicious individuals.” Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/26/the-1965-tragedy-confront-or-forget-past.html>. Diakses 6 Mei 2016.

35 *Kompas*, 29 September 2015.

36 *Kompas*, 29 September 2015.

37 *Kompas*, 29 September 2015.

berbicara tentang apa yang terjadi pada masa lalu, berikut apa yang oleh masing-masing pihak dirasakan sekarang ini. "Kita harus membicarakannya," ajak Magnis. Ia pun cepat-cepat menambahkan, "...dengan berhati-hati iya, tetapi juga [harus] dengan jujur." Menurut dia, sebagai bangsa "kita harus [berani] bertanya, bagaimana kekejaman di luar segala ukuran terhadap bangsa kita sendiri bisa terjadi."³⁸ Kita harus berani bertanya bagaimana "jutaan saudara dan saudari sebangsa yang sedikit pun tak terlibat dalam pembunuhan [atas para Jenderal di Jakarta] itu diburu seperti binatang, ditangkap, disiksa, diperkosa, dibunuh, hanya karena mereka secara politik berpihak pada [sebuah partai politik yang bernama] PKI?"³⁹ Apalagi mengingat bahwa berbeda dengan propaganda Orde Baru, menurutnya "pembunuhan-pembunuhan itu bukan [berbentuk] pengeroyokan spontan oleh masyarakat yang emosional, melainkan dilakukan dengan kepala dingin dan persiapan administratif!" Dengan kata lain, menurut Magnis-Suseno pembunuhan massal pada tahun 1965-66 itu dengan matang direncanakan, dan implimentasinya melibatkan alat-alat negara.⁴⁰ Di mata Magnis-Suseno peristiwa berdarah penuh kekerasan yang terjadi mulai paruh kedua tahun 1965 itu perlu diakui sebagai "peristiwa paling menentukan dan paling traumatik dalam sejarah Indonesia merdeka"⁴¹ dan oleh karena itu sangat mendesak untuk diselesaikan. Sebagaimana disinggung di depan, bagi Magnis "sudah waktunya kita bersama-sama bersedia mengaku bahwa *something went terribly wrong* dalam reaksi terhadap G30S."⁴² "Harus diakui bahwa korban pelanggaran HAM 1965-1966 adalah memang korban," tuturnya.⁴³

Sejalan dengan gagasan Arendt bahwa bertolak dari ke-kita-an yang ada sekarang diperlukan perjuangan demi menciptakan sebuah bentuk ke-kita-an baru di masa depan yang saat ini masih

38 *Kompas*, 29 September 2015. "We, in Indonesia, should have the courage to apologize," kata Magnis pada kesempatan diskusi dalam acara Frankfurt Book Fair tahun 2015. Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/26/the-1965-tragedy-confront-or-forget-past.html>, diakses 6 Mei 2016.

39 *Kompas*, 29 September 2015.

40 *Kompas*, 29 September 2015.

41 *Kompas*, 29 September 2015.

42 *Kompas*, 29 September 2015.

43 <http://www.beritasatu.com/nasional/303051-franz-magnis-negara-perlu-meminta-maaf-kepada-korban-19651966.html>, diakses 6 Mei 2016.

berstatus *not yet*, Magnis-Suseno mengatakan bahwa di masa depan kita harus menjadi bangsa yang memiliki integritas dan harga diri. Mungkin saja sekarang ini integritas dan harga diri itu masih bersifat “belum” atau *not yet*—karena belum sepenuhnya terwujud—tetapi kita berharap bahwa keduanya akan menjadi kenyataan setelah kita berdamai dengan masa lalu melalui rekonsiliasi politik itu. Dengan terjadinya rekonsiliasi itu, Magnis-Suseno berharap akan terjadilah “sinergi bersama yang positif” yang menurut dia juga sangat diperlukan dalam rangka “menghadapi masa depan penuh tantangan.”⁴⁴ Baginya hal itu tidak akan mungkin terjadi jika kita “tak berani menghadapi masa lampau.”⁴⁵ Sehubungan dengan hal itu, tantang Magnis-Suseno: “Kita harus berani menghadapi apa yang terjadi 50 tahun lalu kalau hati bangsa [ini] mau dibersihkan dari segala keterlibatan dan dosa kolektif terhadap sebagian saudara/saudari kita.”⁴⁶ Hanya dengan begitu kehidupan bersama yang sekarang masih *not yet* itu nantinya semakin menjadi realitas bersama.

Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Arendt tentang pentingnya *forgiveness*, bagi Magnis-Suseno salah satu unsur penting dalam rekonsiliasi politik ini adalah adanya tindak permintaan dan pemberian maaf. Namun demikian, bagi Magnis-Suseno, tindak permintaan dan pemberian maaf itu tidak boleh dilakukan begitu saja. Ada langkah-langkah awal yang harus dilalui untuk sampai ke sana. Langkah-langkah itu antara lain upaya untuk secara kolektif menceritakan dan membicarakan peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi di masa lalu. Selain itu, harus ada pula kesediaan dan upaya untuk memberikan keadilan kepada para korban, termasuk mengembalikan nama baik dan hak-hak mereka sebagai warga negara. “Baru sesudah itu kita boleh minta maaf,” kata Magnis-Suseno.⁴⁷ Permintaan dan pemberian maaf ini sangat penting mengingat bahwa, sebagaimana ditekankan oleh Arendt, hal itu memungkinkan terciptanya sebuah tata-kehidupan bersama di mana para warga dari masyarakat yang secara politis terbelah oleh jurang pemisah (*abyss*) dapat menyampaikan

44 *Kompas*, 29 September 2015.

45 *Kompas*, 29 September 2015.

46 *Kompas*, 29 September 2015.

47 *Kompas*, 29 September 2015.

perbedaan pemahaman masing-masing mengenai kekerasan masa lalu berikut pentingnya pemahaman itu bagi kehidupan politik bersama sekarang ini.⁴⁸

Terkait dengan rekonsiliasi politik dan langkah-langkah yang diperlukan itu Magnis-Suseno merasa senang bahwa akhir-akhir ini ada “kelompok-kelompok yang mulai mengusahakan rekonsiliasi”. Ia khususnya senang bahwa ada usaha-usaha seperti itu di kalangan generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) dan di antara orang-orang Katolik di Flores.⁴⁹ Ia juga tak kalah senang bahwa telah terbentuk Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), yang terdiri dari anak-anak dari tokoh-tokoh sipil dan militer yang telah menjadi korban dalam berbagai peristiwa berdarah di Indonesia di masa lampau.⁵⁰ Inisiatif-inisiatif yang tampaknya kecil dan terbatas seperti itu jika dikelola dan dikembangkan dengan sabar nantinya akan memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bangsa Indonesia agar “jangan pernah mengizinkan solidaritasnya dipatahkan dan sebagian warganya menjadi objek kebencian, kekerasan dan penyingkiran karena keyakinan religius atau politik mereka.”⁵¹

4. Realisme Politik

Seiring dengan ajakan rekonsiliasi politik yang didesakkan oleh Magnis-Suseno itu kiranya butir-butir catatan yang dikemukakan oleh Villa-Vincencio tentang rekonsiliasi menarik untuk disimak. Setidaknya ada sepuluh catatan yang menurut Villa-Vincencio (2004: 5-8) perlu diperhatikan dalam setiap upaya rekonsiliasi politik.⁵² *Pertama*, rekonsiliasi tidak harus langsung melibatkan permintaan dan pemberian maaf (*forgiveness*). Permintaan dan pemberian maaf bisa dilakukan kemudian, setelah terciptanya rasa percaya diri pada masing-masing pihak, serta setelah adanya rasa percaya satu sama lain di antara pihak-pihak yang terlibat. *Kedua*, rekonsiliasi itu menginterupsi (*interrupts*) pola-pola kejadian

48 Schaap, hlm 96.

49 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 399.

50 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 399.

51 Magnis-Suseno dalam Schaefer and Wardaya, h. 400.

52 Charles Villa-Vincencio and Eric Duxtader, eds. (2004). *Pieces of the Puzzle: Keywords on Reconciliation and Transitional Justice*. Cape Town: African Minds.

yang selama ini terkesan tak terhindarkan dan seperti sudah seharusnya. Rekonsiliasi menginterupsi lingkaran konflik yang terus berulang seraya mengubah bentuk-bentuk toleransi yang selama ini hanya tersimpan dalam benak hati menjadi bagian dari interaksi sosial yang akan mendorong kesadaran-bersama di antara pihak-pihak yang berlawanan. Kesadaran-bersama yang dimaksud adalah kesadaran-bersama akan adanya kesamaan-kesamaan, yang selanjutnya diharapkan akan mendorong upaya untuk membangun kehidupan-bersama yang baru sebagai sebuah komunitas. *Ketiga*, rekonsiliasi itu membutuhkan proses. Yang namanya rekonsiliasi itu, menurut Villa-Vincencio, tak pernah bisa dipaksakan. Harus pelan-pelan. Dibutuhkan waktu. Bisa jadi rekonsiliasi itu merupakan perjuangan seumur hidup. Bahkan bisa jadi merupakan perjuangan antargenerasi.

Keempat, rekonsiliasi itu menyangkut kesediaan untuk berbicara. Menurut Villa-Vincencio dalam sebuah proses rekonsiliasi dibutuhkan kesediaan untuk membicarakan hal-hal yang selama ini telah menjadi persoalan bersama, sekaligus kesediaan untuk mendengarkan tuturan pihak lain. Kesediaan untuk berbicara dan untuk mendengarkan itu bukan hanya soal kesediaan berbicara dan mendengarkan tentang hal-hal yang sifatnya permukaan, melainkan hal-hal yang sifatnya mendalam, yang menyangkut aspek-aspek kehidupan bersama sebagai sebuah masyarakat. *Kelima*, rekonsiliasi itu melibatkan kesediaan untuk memahami. Jika cerita yang disampaikan dalam sebuah proses rekonsiliasi oleh bekas pelaku adalah cerita yang sebelumnya telah dipikirkan secara mendalam dan yang kemudian disampaikan secara jujur, bisa jadi cerita-cerita itu akan membantu melunakkan sikap para korban, para penyintas, maupun para pengamat pada umumnya. *Keenam*, rekonsiliasi itu melibatkan masalah pengakuan akan kebenaran. Dalam banyak hal, menurut Villa-Vincencio, pengakuan akan kebenaran atas apa yang terjadi sering kali justru lebih penting daripada apa yang telah terjadi itu sendiri.

Ketujuh, rekonsiliasi itu menyangkut masalah ingatan. Banyak hal yang terjadi di masa lalu akan terus hidup, akan terus memengaruhi masa kini, dan akan terus membayangi masa depan bersama. Ingatan akan masa lalu yang tak pernah terungkap

akan terus-menerus menuntut untuk diungkapkan. Ingatan itu juga akan terus menuntut untuk segera dituntaskan. Tujuannya bukan hanya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, melainkan juga sebagai bagian dari upaya untuk menyiapkan diri bagi masa depan. *Kedelapan*, rekonsiliasi itu adalah soal memperjuangkan keadilan. Mengapa? Menurut Villa-Vincencio karena tak ada rekonsiliasi tanpa keadilan. Dalam setiap proses rekonsiliasi keadilan harus ada. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa di masa depan perdamaian dan keadilan akan terus diwujudkan dan akan terus dipertahankan. *Kesembilan*, rekonsiliasi itu melibatkan ganti rugi. Tanpa diperhatikannya aspek sosio-ekonomi, rekonsiliasi bisa membahayakan masa depan konsolidasi demokrasi itu sendiri.

Dan terakhir, *kesepuluh*, rekonsiliasi adalah masalah *survival* atau kelangsungan hidup bersama. Sebagaimana dikatakan di depan, rekonsiliasi itu membutuhkan proses yang panjang. Bisa jadi di dalamnya ada unsur ratapan sedih, kesediaan untuk mendengarkan, upaya untuk bisa saling memahami, penyembuhan, pengakuan, upaya perbaikan kembali, atau unsur-unsur lain. Rekonsiliasi merupakan fondasi sekaligus awal dari cara hidup bersama yang baru. Dalam rekonsiliasi disadari bahwa hidup bersama sebagai komunitas atau masyarakat itu melibatkan proses relasi antara orang-orang yang tak dikenal atau antara pihak-pihak yang sebenarnya saling berlawanan. Dengan kata lain, menurut Villa-Vincencio, rekonsiliasi politik itu merupakan sebetuk realisme politik dan bukan masalah permintaan dan pemberian maaf yang sifatnya melulu personal atau interpersonal. "*Political reconciliation*," tandasnya, "*is about surviving and growing together.*"

Tentu tidak semua catatan yang dikemukakan oleh Villa-Vincencio di atas bisa diterima apalagi harus dipenuhi. Selain itu, mungkin masih ada beberapa catatan lain yang perlu ditambahkan, seperti misalnya perlunya melibatkan tradisi rekonsiliasi yang secara adat atau religius sudah ada di masyarakat, dan sebagainya. Meskipun demikian, kiranya catatan-catatan yang disampaikan itu layak untuk dipertimbangkan jika kita benar-benar ingin

mewujudkan gagasan rekonsiliasi politik sebagaimana yang dianjurkan oleh Hannah Arendt maupun Franz Magnis-Suseno.

5. Tak Terpisahkan

Berakhirnya Perang Dingin pada awal dekade 1990-an membawa dampak global yang sangat luas. Peristiwa bersejarah yang bagi sebagian besar orang datangnya nyaris tak terduga itu membuat banyak relasi internasional maupun nasional menuntut untuk dikaji ulang atau dinegosiasikan kembali. Sejalan dengan itu telah kita lihat di depan bagaimana kajian dan negosiasi kembali relasi-relasi nasional dan internasional itu telah terwujud dalam bentuk dorongan agar diupayakannya rekonsiliasi. Bukan hanya rekonsiliasi yang sifatnya interpersonal, melainkan rekonsiliasi politik yang melibatkan banyak pihak. Bagi Arendt, rekonsiliasi politik ini penting guna menutup jurang pemisah (*abyss*) yang memisahkan sisi para mantan pelaku kekerasan dengan sisi para mantan korbannya. Dalam konteks Indonesia, Magnis-Suseno mendesak kita semua agar segera diupayakannya rekonsiliasi politik terkait dengan kekerasan dan pembunuhan massal pada tahun 1965-66. Dengan lantang dan tegas serta *tanpa tedheng aling-aling* Magnis menyerukan desakan rekonsiliasi itu. Ia yakin dengan begitu kita akan menjadi bangsa yang memiliki integritas dan harga diri yang tinggi.

Dalam rangka merayakan ulangtahunnya yang ke-80 kita patut merasa bangga bahwa bahkan pada usia yang tidak muda lagi Franz Magnis-Suseno SJ (atau yang biasa kami sebut dengan sapaan akrab “Romo Magnis”) tetap berani dan lantang bersuara demi kebenaran dan demi kebaikan bersama sebagai bangsa. Ia tetap saja sehat dan produktif. Usia ke-80 tentu bukan usia sembarangan, mengingat tidak semua manusia bisa mencapainya. Namun bagi Romo Magnis usia tersebut tidak hanya dicapai, melainkan juga telah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memproduksi gagasan-gagasan kritis penuh empati kemanusiaan. Pada usia *sepuh*-nya Romo Magnis tetap bugar, tetap siap-sedia menjadi sahabat dan guru bagi orang-orang di sekitarnya.

6. Berani dan Jujur

Jika diperkenankan, penulis ingin menambahkan sedikit catatan yang lebih bersifat pribadi. Selain ikut merasa bangga, penulis juga merasa beruntung dan terhormat bahwa selama ini boleh mengenal Romo Magnis secara personal. Bagi penulis dia adalah sosok yang tidak hanya tinggi dedikasinya kepada Indonesia sebagai bangsa, tetapi yang juga mau bersahabat dengan orang-orang biasa di sekitarnya. Penulis merasa bersyukur bahwa selama bertahun-tahun telah diberi kesempatan untuk berguru padanya, setidaknya sejak masa-masa kuliah di Sekolah Tinggi filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, dulu hingga kini. Penulis, misalnya, merasa terhormat bahwa dia bersedia menulis Kata Pengantar untuk buku penulis berjudul *Marx Muda* (2003), meskipun buku itu masih sangat sederhana dan aslinya merupakan skripsi di bawah bimbingannya. Romo Magnis juga berkenan mengunjungi penulis ketika penulis bertugas di Kepulauan Carolina, di Mikronesia, walaupun waktu itu rute penerbangan ke sana masih cukup sulit dan membutuhkan banyak waktu.

Di tengah kesibukannya Romo Magnis juga telah bersedia menjadi salah satu kontributor untuk buku berjudul *Berkah Kehidupan* (2010) yang penulis terbitkan. Rasa terhormat juga penulis rasakan bahwa dalam buku biografi Romo Magnis berjudul *Dialog, Kritik, Mission* yang ditulis oleh Heinz Schutte (2013), nama penulis beberapa kali disebut dalam kapasitas sebagai salah satu narasumber.⁵³ Perhatiannya pada masalah Tragedi '65 tidak hanya pada level publik. Secara pribadi dia juga tampak sangat penuh perhatian. Pada tanggal 3 Juni 2014, misalnya, Romo Magnis mengirimkan kepada penulis *soft-copy* sebuah jurnal terbitan Jerman yang berisi tujuh tulisan berbahasa Inggris tentang Tragedi '65.

Pada akhir tahun 2014, ketika atas nama pengurus Pusdema (Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia) Universitas Sanata Dharma, penulis memintanya untuk menjadi salah satu narasumber seminar di seputar tema Tragedi 1965, tanpa pikir panjang Romo Magnis langsung menyanggupi. Padahal waktu

53 Heinz Schutte (2013). *Dialog, Kritik, Mission. Franz Magnis-Suseno, ein indonesischer Jesuit aus Detschland* (Berlin: Regiospectra).

itu dia baru saja kembali dari cuti di Jerman. Ada lebih dari 200 orang peserta mendengarkannya ketika akhirnya dia berbicara di Yogyakarta. Saat penulis bertanya kepadanya apakah sebaiknya penulis turut terlibat atau tidak dalam Simposium Nasional tentang Tragedi 1965 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18-19 April 2016, ia langsung memberi dukungan. Bahkan ia hadir sehari penuh dalam forum akademik tentang Tragedi 1965 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia itu. Di matanya simposium itu merupakan “awal yang baik”. Bahkan menurutnya melalui simposium ini “Kesimpulan tragedi pembunuhan dan kejahatan dan tragedi kemanusiaan bisa diangkat. Masyarakat dan bangsa Indonesia bisa melihat, pemerintah harus membuka kebenaran soal rekonsiliasi...”⁵⁴

Penulis percaya, kebaikan-kebaikan serupa juga telah disampaikan oleh Romo Magnis kepada banyak orang lain di sekitarnya. Tampaknya berbuat baik penuh kerendahan hati kepada sebanyak mungkin orang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup pribadinya. Perhatian khusus yang ia berikan pada masalah Tragedi 1965—khususnya pada mereka yang telah menjadi korban dan penyintasnya—bisa dipandang sebagai perpanjangan dari kebaikan-kebaikan itu.

Sejalan dengan Hannah Arendt, Franz Magnis-Suseno sangat menekankan pentingnya rekonsiliasi, khususnya rekonsiliasi politik. Seperti Arendt pula, ketika bicara mengenai sejarah kelam pembantaian massal di Indonesia serta mendorong diusahakannya rekonsiliasi, Magnis juga diilhami (jika tak mau dikatakan dibayangi) oleh pengalaman negeri Jerman, yang *nota bene* adalah negeri tempat kelahirannya. Terkait dengan pengalaman di Jerman tersebut, sebagaimana telah kita bahas di depan, Magnis-Suseno tentu ingat betul tentang bagaimana sistem komunis dipraktikkan dengan penuh otoritarianisme dan kekerasan. Meskipun demikian ia menolak bahwa atas nama kebencian akan komunisme lalu sekian banyak warga negara boleh dirampas begitu saja hak-haknya. Tak boleh pula mereka terus-menerus dicurigai serta dipinggirkan dari arus utama kehidupan masyarakat. Ia mendesak

54 <http://news.detik.com/berita/3190973/ini-harapan-akademisi-dan-budayawan-dalam-simposium-membedah-tragedi-1965> diakses 16 Mei 2016.

agar Indonesia secara berani dan jujur menghadapi dan mengolah masa lalunya melalui proses rekonsiliasi. Jalan keluar harus segera ditemukan agar Indonesia siap melangkah ke masa depan dengan lebih mantap dan tanpa harus terus terbebani oleh kekejian-kekejian masa lalu. Di banyak negara berakhirnya Perang Dingin telah mendorong dikaji-ulang atau dinegosiasikannya kembali relasi-relasi internasional maupun nasional. Di Republik ini, semoga kajian-ulang atau negosiasi serupa juga terjadi, termasuk kajian atas masa lalu yang penuh kekerasan demi masa depan yang saling menghormati sebagai sesama warga-negara. ☺

Daftar Pustaka

- Amstutz, Mark R. *The Healing of Nations: The Promise and Limits of Political Forgiveness*. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2005.
- Arendt, Hannah (1968). *Men in Dark Times*. New York: Harcourt Brace & Co.
- ____ (1994) *Essays in Understanding 1930-1954*, J.Kohn (ed.). New York: Harcourt Brace & Co.
- ____ (1998). *The Human Condition*, 2nd edn. Chicago: University of Chicago Press.
- Barkan, Elazar and Alexander Karn, Eds. (2006). *Taking Wrong Seriously: Apologies and Reconciliation*. Stanford: Stanford University Press.
- Hayner, Priscilla B. (1995/2002). *Mencari Akar dan Pandangan Bersama*. Jakarta: Elsam.
- Magnis-Suseno SJ, Franz. "Indonesia 1965-66 dalam Pengalaman Saya" dalam Bernd Schaefer and Baskara T. Wardaya (2013). *1965: Indonesia and the World / Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Gramedia.
- ____ (2015) "Membersihkan Dosa Kolektif G30S", dalam *Kompas*, 29 September 2015.
- Schaap, Andrew (2009). *Political Reconciliation*. London: Routledge.
- Schmit, Carl (1996). *The Concept of the Political*. Chicago: University of Chicago Press.
- Schutte, Heinz (2013). *Dialog, Kritik, Mission. Franz Magnis-Suseno, ein indonesischer Jesuit aus Detschland*. Berlin: Regiospectra.
- Villa-Vincencio, Charles and Eric Doxtader, eds. (2004). *Pieces of the Puzzle: Keywords on Reconciliation and Transitional Justice*. Cape Town: African Minds.

